



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI VII DPR RI
(BIDANG: ENERGI, RISET DAN INOVASI, SERTA INDUSTRI)**

Tahun Sidang	: 2023 – 2024
Masa Persidangan	: II
Rapat	: Ke – 15 (lima belas)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Kepala SKK Migas
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis, 30 November 2023
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I Lantai I
Acara	: 1. Progress Lifting Migas Kwartal IV 2023 2. Iklim Investasi Hulu Migas 3. Lain-Lain
Ketua Rapat	: Sugeng Suparwoto (Ketua Komisi VII DPR RI/ F.P.Nasdem)
Sekretaris Rapat	: Dwiyanti, S.Sos.
Hadir	: A. Pemerintah - Kepala SKK Migas B. 12 Orang Anggota dari 52 Orang Anggota Komisi VII DPR RI terdiri dari: 12 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir fisik 40 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Kamis 30 November 2023 dibuka pukul 11.15 WIB, dipimpin oleh Sugeng Suparwoto, selaku Ketua Rapat Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan acara:
 - a. Progress Lifting Migas Kwartal IV 2023
 - b. Iklim Investasi Hulu Migas
 - c. Lain-Lain

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI memberikan apresiasi atas upaya SKK Migas dalam mendorong KKKS untuk meningkatkan produktivitas hulu migas di Tahun 2023.
2. Komisi VII DPR RI mendukung rekomendasi SKK Migas agar:
 - a. Pemerintah tidak memberlakukan PNBK pada saat kegiatan eksplorasi, namun akan dibayarkan apabila ada produksi.
 - b. Mengutamakan investasi di bidang migas jika terjadi tumpang tindih lahan dengan membahas isu tersebut bersama Kementerian terkait.
 - c. Pemerintah segera melakukan revisi PP Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
 - d. Pemerintah segera melakukan revisi PP Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.
 - e. Mempercepat penyelesaian pembangunan pipa gas Sei Mangke – Dumai dan Cirebon – Semarang untuk meningkatkan salur gas bumi.

Dan Komisi VII DPR RI akan membahas rekomendasi tersebut dalam Rapat Kerja dengan Menteri ESDM RI.

3. Komisi VII DPR RI mendesak Kepala SKK Migas untuk mengkoordinasikan KKKS agar mempercepat realisasi Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) kepada masyarakat sesuai target *Work Program and Budget (WP&B)*.

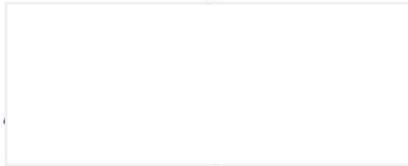
4. Komisi VII DPR RI meminta Kepala SKK Migas untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 7 Desember 2023.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 13.30 WIB

Jakarta, 30 November 2023

KEPALA SKK MIGAS



DWI SOETJIPTO

KETUA RAPAT,



SUGENG SUPARWOTO
A-373